

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDY DI DESA BATURAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu

Hukum pada Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Muhammad Yusuf Iqbal

NIM. E0012265

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDY DI DESA BATURAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

Oleh :

Muhammad Yusuf Iqbal

NIM. E0012265

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, September 2016

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Suranto S.H., M.H.

NIP. 195608121986011001

Pembimbing II



M. Madalina, S.H., M.Hum

NIP. 196010241986022001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDY DI DESA BATURAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

Disusun Oleh :

Muhammad Yusuf Iqbal

NIM. E0012265

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 3 Oktober 2016

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Jadmiko Anom Husodo, S.H.,M.H. :

NIP. : 197004241995121001

Ketua

2. Nama : Maria Madalina, S.H.,M.Hum. :

NIP. : 196010241986022001

Sekretaris

3. Nama : Suranto, S.H.,M.H :

NIP. : 195608121986011001

Anggota



Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum

NIP. 196011071986011001

SURAT PERNYATAAN

(KEASLIAN PENULISAN HUKUM/SKRIPSI)

Nama : Muhammad Yusuf Iqbal
NIM : E0012265
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tgl Lahir : Surakarta/ 27 Maret 1994
Alamat Rumah : Sukomulyo RT02 RW06, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta
No. Telp./HP : 081391444397
Judul Penulisan Hukum : Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Study Di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti Penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi/hukuman berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan lulus :Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuj kembali
 - b. Setelah dinyatakan lulus :Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaan yang telah diperoleh

Deikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa tekanan dan paksaan orang lain.

Surakarta, 22 September 2016

Yang membuat pernyataan



Muhammad Yusuf Iqbal

NIM. E0012265

ABSTRAK

Muhammad Yusuf Iqbal, E0012265, PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDY DI DESA BATURAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016.

Penelitian ini membahas tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. BPD sebagai salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wadah pelaksana demokrasi di desa dan telah menunjukkan peran yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien.

Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimanakah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupate Karanganyar. Kedua, kendala-kendala apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan bagaimanakah penyelesaian solusinya.

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian empiris dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber pada instansi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan perannya sebagai pelaksana pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan fungsinya seperti pengawasan terhadap pelaksana Peraturan Desa, pengawasan terhadap pendapatan dan belanja desa, pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa, pengawasan terhadap pelayanan Kepala Desa serta perangkat desa terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Undang-Undang Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Otonomi Desa, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah Tentang Desa

ABSTRACT

Muhammad Yusuf Iqbal, E0012265, THE ROLE OF THE CONSULTATIVE BODIES OF THE VILLAGE (BPD) IN THE IMPLEMENTATION OF SURVEILLANCE AGAINST THE HOLDING OF VILLAGE GOVERNANCE BY LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE STUDY IN THE VILLAGE OF BATURAN SUB-DISTRICT OF COLOMADU KARANGANYAR REGENCY.*Skripsi*: Faculty of law, University Sebelas Maret Surakarta 2016.

This study discusses the role of the Consultative Bodies of the village (BPD) in conducting oversight towards the Organization of the Government of the village of Baturan in the village of Colomadu sub-district of Karanganyar Regency. The Agency's consultative village as one of the elements of the Organization of the Government of the village formed as container implementing democracy in the village and has showed a very important role in supporting the implementation of the Government's holding of the village layout.

This law describes writing and reviewing the issue, first how the role of the Consultative Bodies of the village in the implementation of surveillance against the conduct of the Government of the village of Baturan sub-district of Colomadu Village in Karanganyar Regency. Second, what are the obstacles faced by the Agency's consultative village in conducting surveillance against the conduct of the Government of the village, and how is the completion of the solution.

This research was carried out in Baturan village of Colomadu Sub-district Hall Karanganyar Regency. The author uses data collection techniques in the form of empirical research by conducting the interview directly to the speaker in such establishments.

The research results showed that the supervisory body of the provisional village in the village of Baturan sub-district of Colomadu Karanganyar Regency is in compliance with the applicable local Karanganyar Regency number 25 in 2006 about the Agency's consultative village and law number 6 Year 2014 Of the village. Based on its role as a Consultative Body monitoring, implementing village in Baturan village of Colomadu sub-district of Karanganyar Regency has been carrying out its functions such as supervision of implementing Regulations against the village, surveillance against income and expenditure of the village, the village head of supervision, surveillance against the village chief and Councilor to the community.

Keywords: *Laws Of The Republic Of Indonesia, Local Government, The Autonomy Of The Village, Local Regulations, Government Regulations About The Village*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Allhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dalam rangka melengkapi persyaratan guna meraih derajat Sarjana (S1) dalam ilmu hukum di Fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada.

1. Kedua orang tua penulis Bapak Hamid Arifin dan Almh. Latifah Robbaniyah, saudara penulis Lutfi Arif yang senantiasa memberi dukungan untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto.S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Suranto S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Suranto S.H.,M.H. selaku Pembimbing Penulisan Hukum I dan Ibu Maria Madalina S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Penulisan Hukum II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberi bimbingan dan arahan bagi penulis dalam menyusun Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
5. Bapak Heri Hartanto S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya para dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak Suseno S.H.,M.H selaku Kepala Desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang telah membantu dan

mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian Penulisan Hukum (Skripsi) di Desa Baturan.

8. Pemimpin dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karangayar yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian Penulisan Hukum (Skripsi).
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukkan, saran tetap penulis harapkan. Semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	16
1. Tinjauan tentang Pemerintah Desa	16
2. Tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Desa	24
3. Tinjauan tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa	33
a. Pengertian Pengawasan.....	33
b. Sistem Pengawasan	34
c. Jenis Pengawasan	36
d. Maksud, Tujuan, Fungsi Pengawasan	37
4. Tinjauan Pengawasan Secara Efektif dan Integratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	39
a. Kepala Desa	41
b. Perangkat Desa	44
B. Kerangka Pemikiran	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	47
1. Deskripsi Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.....	47
2. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar	50
3. Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar	56
B. Pembahasan	58
1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	58
2. Kendala yang Dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Solusinya	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN